

## ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, tanpa di sadari pembangunan merupakan penyebab dari perubahan lingkungan hidup yang berskala besar, berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada pada saat ini merupakan pencipta limbah yang dapat mencemarkan lingkungan, adapun masalah lingkungan secara mendasar didefinisikan sebagai “perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negative terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia” dengan demikian dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, pemerintahan maupun Negara Indonesia. Masalah lingkungan akhir-akhir ini merupakan salah satu masalah yang menduduki tempat perhatian yang tidak ada habis-habisnya, ada dua hal yang paling berkaitan didalam masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena saat ini kerusakan lingkungan hidup sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan menjadi masalah yang meng-global paada era sekarang.

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa tahap penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, yang terdiri dari Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa literatur kepustakaan ataubuku-buku, karya ilmiah, tulisan dan pendapat para ahli, serta Bahan hukum tersier, yaitu berupa semua data-data yang memberikan tambahan ilmu dan informasi berupa Kamus Bahasa Indonesia dan jurnal-jurnal di internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a country that is actively carrying out development, without realizing that development is the cause of large-scale environmental changes, various kinds of industrial and technological activities currently exist that create waste that can pollute the environment, while environmental problems are fundamentally defined. as "changes in the environment, either directly or indirectly, which may cause negative consequences on human health and welfare" thus causing harm to society, the government and the State of Indonesia. Environmental problems lately are one of the problems that occupy the place of endless attention, there are two things that are most related in the problem of environmental management, namely the emergence of environmental pollution and destruction because currently environmental damage has become a very serious problem. unsettling for humans and a global problem in the present era.*

*In the preparation of this thesis, the author uses several stages of research to obtain the necessary data, which consists of primary legal materials, namely in the form of statutory regulations, namely Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Protection And Environmental Management. Furthermore, secondary legal materials, namely materials that provide an explanation of primary legal materials, in the form of literature or books, scientific works, writings and opinions of experts, as well as tertiary legal materials, namely in the form of all data that provide additional knowledge and information in the form of Indonesian Dictionary and journals on the internet.*

*The results showed that environmental law enforcement in the field of waste management refers to 3 legal systems which are a combination of components, namely structure, substance and culture / culture. In addition, with regard to law enforcement in waste management, it can be studied from 2 sides, namely preventive and repressive law enforcement. Law enforcement in waste management is also a manifestation of the government and local governments in implementing the principles of Good Environmental Governance with the aim of raising awareness for the community about the importance of waste management.*